



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (20225) pp: 581-586

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan Nilai Kerakyatan Pancasila dalam Menangkal Polarisasi Opini di Media Sosial

William Victorio, Raja Oloan Tumanggor, Bintang Maharani, Nadya Isfahany Pasya, Grace Angel, Yoga Pangestu

Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

william.705220226@stu.untar.ac.id, rajat@fpsi.untar.ac.id, bintang.705220313@stu.untar.ac.id,
nadya.705220373@stu.untar.ac.id, grace.705220428@stu.untar.ac.id, yoga.705220473@fpsi.untar.ac.id

Abstrak

Polarisasi opini di media sosial Indonesia semakin menguat akibat algoritma digital yang menciptakan echo chamber dan filter bubble, membatasi keberagaman berbagai perspektif serta memperkuat bias kognitif. Fenomena ini mengancam kohesi sosial dan mengikis nilai-nilai deliberatif yang sudah menjadi ciri khas demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji relevansi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai kerangka normatif dalam meredam polarisasi digital. Analisis dilakukan terhadap literatur terkini yang akan membahas pengaruh algoritma, fragmentasi identitas, dan perilaku kewarganegaraan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam Pancasila dapat mendorong dialog inklusif, mereduksi konflik identitas, serta memperkuat ketahanan nasional. Selain itu, literasi digital berbasis nilai Pancasila diidentifikasi sebagai strategi penting dalam menghadapi polarisasi, dengan menekankan sinergi antara kebijakan publik, tata kelola platform, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Melalui internalisasi nilai etis dan tanggung jawab sosial dalam praktik digital, Indonesia berpeluang membangun demokrasi yang deliberatif dan inklusif di tengah disrupsi teknologi. Secara keseluruhan, penerapan nilai kerakyatan Pancasila secara kontekstual dalam ruang digital bukan hanya menjadi solusi normatif terhadap polarisasi opini, tetapi juga fondasi strategis dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan tangguh menghadapi tantangan era digital.

Kata kunci: Polarisasi Opini, Media Sosial, Echo Chamber, Filter Bubble, Pancasila, Kohesi Sosial, Demokrasi Digital

1. Latar Belakang

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, berfungsi tidak hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai arena pertukaran informasi dan pembentukan opini publik. Laporan Indonesia Digital Report 2025 mencatat bahwa sebanyak 78,3% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial dengan rata-rata waktu penggunaan 3 jam 15 menit per hari (GoodStats, 2025). Angka ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, sebagaimana diungkapkan Chaerudin (2025), ruang publik digital ini juga membawa tantangan serius berupa meningkatnya polarisasi opini publik yang mengancam kohesi sosial. Polarisasi opini publik terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan secara ekstrem dalam memandang suatu isu.

Menurut Jain et al. (2024), media sosial tidak lagi berfungsi secara netral sebagai platform komunikasi, melainkan menjadi agen yang turut membentuk cara individu menerima dan menafsirkan informasi. Fenomena ini erat kaitannya dengan keberadaan echo chamber dan filter bubble, dua konsep yang merujuk pada dampak algoritma digital dalam mempersempit keragaman informasi yang diterima pengguna. Menurut Rahayu dan Nugraha (2024), echo chamber adalah situasi ketika individu hanya terpapar pada pandangan atau opini yang sejalan dengan keyakinan pribadi melalui interaksi berulang dalam ruang digital yang homogen. Hal ini memperkuat bias kognitif karena minimnya paparan terhadap pandangan yang berbeda. Sedangkan filter bubble sebagaimana dijelaskan oleh Wulandari (2021), merupakan kondisi ketika algoritma media sosial menyaring konten berdasarkan preferensi dan riwayat interaksi pengguna, sehingga secara tidak sadar membatasi akses

terhadap informasi yang beragam. Kedua fenomena ini menjadikan media sosial bukan lagi ruang diskusi yang inklusif, melainkan lebih menyerupai ruang gema yang memperkuat pendapat tertentu.

Lebih lanjut, Rahayu dan Nugraha (2024) menemukan bahwa echo chamber tidak hanya mempengaruhi pola konsumsi informasi tetapi juga membentuk cara berpikir kritis pengguna media sosial. Lingkungan digital yang homogen menimbulkan rasa “dibenarkan” yang berlebihan (confirmation bias), sehingga individu cenderung menolak informasi yang berbeda dengan opini dominan di lingkarannya. Efeknya, dialog publik yang seharusnya menjadi wadah pertukaran gagasan dan nilai demokratis justru berubah menjadi ajang polarisasi identitas. Fenomena ini diperkuat oleh algoritma filter bubble yang terus menyuplai informasi yang sesuai dengan preferensi politik atau sosial pengguna, mengurangi kemampuan individu untuk melihat isu secara lebih objektif (Wulandari, 2021). 2 <https://doi.org/...../ijaeb.xxx>

Dalam konteks Indonesia, polarisasi akibat media sosial semakin tampak selama lima tahun terakhir. Purboyo et al. (2024) menunjukkan bahwa eskalasi partisan politik meningkat secara signifikan melalui platform seperti TikTok dan X (sebelumnya Twitter) terutama menjelang Pemilu 2024. Polarisasi ini bukan hanya terbatas pada isu politik, tetapi juga pada isu-isu sosial lain seperti pandemi COVID-19, kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hingga perdebatan terkait konflik agraria dan lingkungan. Chaerudin (2025) menyebutkan bahwa keberlanjutan polarisasi ini menimbulkan fragmentasi identitas sosial di masyarakat, di mana kelompok “pro” dan “kontra” menjadi semakin terpisah dan sulit menemukan titik temu. Dampak dari polarisasi ini juga mengancam nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Ramlan et al. (2025) menekankan pentingnya penjiwaan nilai sila keempat untuk memastikan setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara bijaksana melalui dialog dan musyawarah. Namun, dengan adanya echo chamber dan filter bubble, proses musyawarah yang inklusif terhambat karena masyarakat lebih memilih berada dalam kelompok dengan pandangan serupa dan enggan mendengarkan argumen yang berbeda. Kondisi ini menggerus esensi kerakyatan dan menghambat tercapainya kesepakatan yang adil. Selain itu, polarisasi media sosial juga memunculkan dampak sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan perpecahan antarwarga di dunia nyata.

Chaerudin (2025) menekankan bahwa ketegangan di ranah digital sering kali meluas menjadi konflik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini mengganggu stabilitas sosial serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan proses demokrasi. Oleh karena itu, menjaga keutuhan ruang publik digital menjadi bagian penting dalam mempertahankan harmoni sosial dan politik di Indonesia. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, artikel ini dibuat sebagai respons terhadap semakin menguatnya polarisasi opini publik yang dipicu oleh algoritma media sosial, echo chamber, dan filter bubble. Artikel ini dibuat untuk mengkaji bagaimana penerapan nilai Pancasila, khususnya sila ke-4 agar dapat menjadi pedoman moral sekaligus kerangka etis untuk meredam perpecahan opini yang terjadi di ruang digital. Dengan menekankan nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan keterbukaan terhadap perbedaan, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi yang inklusif di era digital. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat dan pembuat kebijakan akan pentingnya literasi kritis digital yang berpadu dengan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menjaga persatuan dan keharmonisan sosial di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, menganalisis, dan merangkum berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan penelitian yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Fokus kajian diarahkan pada isu polarisasi opini di media sosial dan keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Analisis dilakukan secara bertahap melalui seleksi literatur, klasifikasi tema, dan sintesis temuan. Hasil kajian mengidentifikasi empat tema utama, yaitu dinamika polarisasi opini, faktor pemicu seperti algoritma dan disinformasi, dampak terhadap kualitas demokrasi, serta relevansi nilai kerakyatan Pancasila sebagai strategi normatif dalam meredam polarisasi. Tinjauan ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital sebagai upaya memperkuat kohesi sosial dan ketahanan bangsa.

Dalam artikel berjudul “Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet”, Wulandari (2021) menjelaskan bahwa algoritma media sosial membatasi akses informasi dengan menciptakan ruang interaksi yang sempit. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan filter bubble dan echo chamber memperkuat kecenderungan bias kognitif sekaligus memperdalam polarisasi opini publik. Hasil ini sejalan dengan sejalan dengan kajian Purboyo (2024) dalam tulisannya “Eskalasi partisanship politik dalam pembentukan polarisasi pada masyarakat digital (Studi pada platform media sosial di TikTok)”, yang menunjukkan bahwa algoritma TikTok mempercepat fragmentasi politisi melalui penyebaran konten partisan yang viral. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa polarisasi digital tidak hanya bersumber dari interaksi sosial, melainkan juga dipengaruhi oleh rancangan teknologi yang secara sistematis memperkuat segregasi pandangan. Artikel lainnya yang berjudul “Refleksi kritis terhadap relevansi Pancasila di era disrupsi digital” yang ditulis oleh Nisa (2023) menegaskan peran Pancasila sebagai acuan etis dalam merespons tantangan yang muncul akibat digitalisasi. Dengan pendekatan analisis reflektif-kritis, kajian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, berfungsi sebagai dasar normatif untuk mengelola perbedaan pandangan yang berkembang di ruang media sosial. Nisa (2023) menekankan bahwa peningkatan ujaran kebencian dan polarisasi politik berisiko mengikis kohesi sosial. Kajian tersebut menguraikan bahwa Pancasila tidak hanya memiliki relevansi dalam konteks politik formal, tetapi juga berperan penting sebagai dasar etika digital yang mampu menyeimbangkan kebebasan ekspresi dengan kewajiban menjaga tanggung jawab sosial.

Agustin dan Akmaluddin (2023) melalui artikel berjudul “Penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam era digital: Analisis konflik sosial media berdasarkan perspektif Pancasila meneliti dinamika konflik yang berkembang di media sosial. Melalui pendekatan analisis wacana, penelitian tersebut mengkaji bagaimana perbedaan pandangan politik maupun sosial memicu ketegangan dalam interaksi digital. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa media sosial lebih sering berfungsi sebagai ruang pertentangan yang memperdalam perbedaan, alih-alih menjadi sarana dialog yang konstruktif. Kajian yang berjudul “Penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam era digital” yang ditulis oleh Agustin dan Akmaluddin (2023) menegaskan bahwa prinsip musyawarah mufakat dalam sila keempat Pancasila berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat inklusif. Melalui penguatan dialog partisipatif, nilai tersebut diyakini mampu menjaga kohesi sosial sekaligus mencegah terjadinya fragmentasi masyarakat yang dipicu oleh polarisasi opini. Jain et al. (2024) melalui artikel berjudul “Pengaruh media sosial terhadap demokrasi Pancasila” menelaah peran ambivalen media sosial dalam dinamika demokrasi Indonesia.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial berfungsi ganda, di satu sisi memperluas ruang partisipasi politik masyarakat, namun di sisi lain justru memperkuat polarisasi serta mempercepat penyebaran disinformasi. Isu pokok yang dibahas berkaitan dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas bermedia sosial, sehingga ruang digital kerap dipenuhi ujaran kebencian serta sikap intoleran. Penelitian tersebut menegaskan urgensi literasi digital yang berlandaskan Pancasila, terutama nilai kerakyatan yang menekankan musyawarah dan penghargaan terhadap perbedaan, sebagai fondasi penting untuk mewujudkan demokrasi Pancasila di ranah digital. Penekanan serupa juga ditemukan dalam studi oleh Daeli et al. (2024), yang menunjukkan bahwa polarisasi politik di media sosial dapat dikurangi melalui penguatan nilai persatuan dan toleransi, serta kampanye digital yang mengedepankan keberagaman sebagai strategi untuk meredam konflik identitas. Purboyo (2024) melalui artikel “Eskalasi partisanship politik dalam pembentukan polarisasi pada masyarakat digital (Studi pada platform media sosial TikTok)” memberikan gambaran yang lebih terfokus mengenai bagaimana algoritma TikTok berperan dalam memperkuat polarisasi politik. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisanship politik di media sosial tidak hanya terbentuk dari preferensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme algoritmik yang secara aktif mendorong pengguna untuk terus terpapar pada konten yang bersifat homogen. Penelitian tersebut merekomendasikan pentingnya penerapan regulasi platform serta penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menjaga keseimbangan ruang publik digital. Kesimpulan yang dihasilkan menegaskan bahwa ketiadaan intervensi berbasis nilai kebangsaan dapat membuat media sosial semakin memperdalam fragmentasi sosial.

Dari hasil kajian terhadap kelima artikel, dapat disimpulkan bahwa polarisasi opini di media sosial merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor teknologi, budaya digital, serta lemahnya internalisasi nilai kebangsaan. Kehadiran filter bubble dan echo chamber memperkuat segregasi pandangan, sedangkan rendahnya etika digital semakin memperuncing konflik. Meskipun demikian, literatur menegaskan bahwa Pancasila, khususnya sila keempat mengenai kerakyatan melalui musyawarah mufakat, menawarkan solusi normatif

sekaligus praktis untuk mereduksi polarisasi. Dengan mengintegrasikan nilai musyawarah ke dalam literasi digital, masyarakat berpotensi membangun ruang publik yang lebih inklusif, deliberatif, dan berkeadaban.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil kajian literatur, polarisasi opini di media sosial Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor teknologi, perilaku digital masyarakat, dan lemahnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Temuan menunjukkan bahwa algoritma media sosial berperan signifikan dalam menciptakan echo chamber dan filter bubble yang mempersempit paparan informasi pengguna (Wulandari, 2021). Kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya terpapar konten yang sejalan dengan pandangan mereka, sehingga memperkuat bias kognitif dan mempertajam polarisasi kelompok. Penelitian Metzler dan Garcia (2024) dalam tinjauan komprehensif mereka mengenai mekanisme algoritmik di media digital menegaskan bahwa algoritma platform tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi secara aktif membentuk polarisasi melalui personalisasi konten yang memperkuat bias konfirmasi pengguna. Studi mereka menemukan bahwa mekanisme algoritmik bekerja melalui dua jalur utama, yaitu dengan memprioritaskan konten yang memicu keterlibatan emosional tinggi, dan dengan menciptakan lingkungan informasi yang homogen yang membatasi paparan terhadap perspektif yang beragam.

Filter bubble dan echo chamber terbukti menjadi pendorong utama fragmentasi identitas sosial di ruang digital. Rahayu dan Nugraha (2024) menemukan bahwa algoritma platform media sosial secara sistematis menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan ruang tertutup di mana keyakinan yang sudah ada terus diperkuat tanpa adanya perspektif alternatif. Cinelli et al. (2021) dalam studinya yang komprehensif mengenai efek echo chamber menunjukkan bahwa pengguna media sosial cenderung berinteraksi dengan informasi yang mengkonfirmasi pandangan mereka yang sudah ada, menciptakan kelompok-kelompok homogen yang terisolasi secara ideologis. Fenomena ini berdampak pada melemahnya kohesi sosial dan meningkatnya konflik identitas yang terlihat jelas dalam praktik labelisasi seperti “pro” dan “kontra” pada berbagai isu politik dan sosial. Polarisasi semacam ini tidak hanya mengganggu kualitas demokrasi digital, tetapi juga mengikis nilai-nilai deliberasi dan musyawarah yang seharusnya menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia (Chaerudin, 2025). Purboyo et al. (2024) dalam studinya mengenai platform TikTok menunjukkan bahwa eskalasi partisan politik meningkat secara signifikan menjelang pemilu 2024, di mana algoritma platform secara aktif mendorong pengguna untuk terus terpapar pada konten yang bersifat homogen.

Temuan ini menyatakan bahwa partisanship politik di media sosial tidak hanya terbentuk dari preferensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme algoritmik yang memperkuat segregasi pandangan. Törnberg (2022) menambahkan bahwa media digital mendorong polarisasi afektif melalui proses partisan sorting, di mana individu tidak hanya berbeda pendapat secara politik, tetapi juga mengembangkan perasaan negatif yang kuat terhadap kelompok lawan. Kondisi ini diperparah oleh penyebaran disinformasi dan hoaks yang menjadi pemicu memperkuat bias kognitif kelompok, sementara lemahnya etika digital memperburuk konflik dan memperlemah ruang deliberasi publik yang netral dan konstruktif. Polarisasi opini juga memiliki dampak psikologis dan sosiologis yang signifikan, Bail et al. (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan dalam lingkungan digital yang terpolarisasi dapat memperkuat stereotip, mengurangi empati, dan meningkatkan kecemasan sosial. Ketika individu terus menerus terpapar pada konten yang mengukuhkan pandangan mereka, mereka cenderung mengembangkan perasaan permusuhan terhadap kelompok lain, yang pada akhirnya memperlemah solidaritas sosial dan memperkuat segregasi identitas.

Dalam ekosistem media sosial Indonesia, influencer dan konten kreator memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Di satu sisi, mereka dapat memperkuat polarisasi dengan menyebarkan konten yang bersifat partisan atau provokatif demi meningkatkan engagement. Di sisi lain, mereka juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial jika memanfaatkan pengaruhnya untuk mempromosikan dialog lintas kelompok dan nilai-nilai kebangsaan. Studi oleh Prasetyo dan Lestari (2023) menunjukkan bahwa konten kreator yang mengangkat narasi inklusif dan edukatif cenderung menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat dan mengurangi tensi ideologis antar pengguna.

Fenomena polarisasi opini di media sosial Indonesia semakin nyata dalam momentum politik seperti Pemilu 2019 dan 2024. Misalnya, pada platform Twitter dan TikTok, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan

tagar yang bersifat labelisasi seperti #cebong dan #kampret, yang mencerminkan fragmentasi ideologis masyarakat. Studi oleh Maulana et al. (2024) menunjukkan bahwa algoritma TikTok secara aktif mendorong kontek partisan menjelang pemilu, memperkuat segregasi pandangan dan memperlemah ruang deliberatif. Kasus ini juga menunjukkan bahwa polarisasi bukan hanya fenomena global, tetapi juga memiliki manifestasi lokal yang perlu ditangani secara kontekstual. Temuan-temuan ini sejalan dengan teori demokrasi digital yang menyatakan bahwa teknologi memberikan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, media sosial memberikan kebebasan berekspresi dan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik dan menyampaikan aspirasi (Jain et al., 2024).

Masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi politik, terlibat dalam gerakan sosial, dan membentuk opini publik. Di sisi lain, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kebebasan berekspresi yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Gorwa (2019) menekankan pentingnya platform governance sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana platform media sosial mengatur konten, perilaku pengguna, dan interaksi digital, yang memiliki implikasi signifikan terhadap ruang publik demokratis. Ketiadaan literasi digital yang memadai dan regulasi yang efektif menyebabkan media sosial berpotensi menjadi instrumen perpecahan yang justru mengancam stabilitas demokrasi Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti UU ITE dan menginisiasi program literasi digital, efektivitasnya dalam menangkal polarisasi masih terbatas. Ketiadaan kerangka kerja yang komprehensif dalam platform governance menyebabkan pengawasan konten dan perilaku digital belum optimal. Regulasi harus tidak hanya bersifat represif, tetapi juga promotif, dengan mendorong desain platform yang mendukung keterpaparan lintas perspektif dan dialog inklusif. Peran Kominfo, BSSN, dan lembaga pendidikan menjadi krusial dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan berorientasi pada kesatuan.

Dalam konteks inilah nilai kerakyatan Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menjadi relevan sebagai solusi normatif (Ramlan et al., 2025). Prinsip musyawarah yang menekankan dialog inklusif dan pencarian titik temu demi kepentingan bersama dapat menjadi kerangka untuk mendorong diskusi yang sehat di media sosial. Agustin dan Akmaluddin (2023) menegaskan bahwa prinsip musyawarah mufakat dalam sila keempat Pancasila berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat inklusif. Melalui penguatan dialog partisipatif, nilai tersebut diyakini mampu menjaga kohesi sosial sekaligus mencegah terjadinya fragmentasi masyarakat yang dipicu oleh polarisasi opini. Nilai hikmat kebijaksanaan mengutamakan kebijaksanaan dalam berpikir daripada reaktivitas emosional yang sering mendominasi interaksi digital. Nisa (2023) dalam refleksi kritisnya menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya memiliki relevansi dalam konteks politik formal, tetapi juga berperan penting sebagai dasar etika digital yang mampu menyeimbangkan kebebasan ekspresi dengan kewajiban menjaga tanggung jawab sosial. Implementasi nilai-nilai ini dalam ruang digital membutuhkan literasi kritis berbasis Pancasila, di mana masyarakat tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga dapat mengevaluasi, memverifikasi, dan merespons informasi secara bijaksana dengan tetap menghormati perbedaan pendapat.

Guess et al. (2020) dalam penelitiannya di Amerika Serikat dan India membuktikan bahwa intervensi literasi media digital dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara berita mainstream dan strategi efektif dalam menangkal dampak negatif polarisasi dan misinformasi. Literasi digital berbasis nilai Pancasila merupakan kunci utama dalam membangun ekosistem media sosial yang lebih sehat. Dengan menginternalisasi prinsip musyawarah mufakat dalam praktik bermedia sosial, masyarakat dapat membangun ruang publik yang inklusif, deliberatif, dan berkeadaban. Hal ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam menyediakan regulasi yang tepat, industri teknologi dalam mendesain platform yang lebih bertanggung jawab, institusi pendidikan dalam mengajarkan literasi digital kritis, dan masyarakat dalam mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di ruang digital (Jain et al., 2024). Cukup dengan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai kebangsaan, polarisasi opini di media sosial dapat diminimalisir dan kohesi sosial dapat diperkuat. Secara keseluruhan, nilai kerakyatan Pancasila memiliki potensi besar untuk menangkal polarisasi opini di media sosial, asalkan ada upaya berkelanjutan dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui pendidikan, literasi digital, dan kebijakan yang mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan berorientasi pada persatuan Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip musyawarah, hikmat kebijaksanaan, dan literasi digital menjadi strategi fundamental dalam menjaga ketahanan bangsa di era disrupsi informasi

4. Kesimpulan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa polarisasi opini di media sosial Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh algoritma digital, perilaku pengguna, serta lemahnya penghayatan nilai kebangsaan. Faktor-faktor tersebut memicu terbentuknya echo chamber dan filter bubble yang membatasi keragaman informasi sekaligus memperkuat konflik identitas. Situasi ini tidak hanya mengancam kualitas demokrasi digital, tetapi juga melemahkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan yang menjadi ciri khas budaya bangsa. Dalam kerangka tersebut, penerapan nilai kerakyatan Pancasila, khususnya sila keempat, relevan sebagai landasan normatif untuk mendorong dialog yang inklusif, memperkuat kohesi sosial, serta menumbuhkan literasi digital yang kritis dan berkeadaban. Melalui sinergi antara regulasi pemerintah, tanggung jawab platform digital, pendidikan literasi kritis, dan partisipasi aktif masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan secara kontekstual di ruang digital sehingga polarisasi opini dapat ditekan dan demokrasi Indonesia berkembang secara lebih deliberatif, inklusif, serta berorientasi pada persatuan bangsa

Referensi

1. Agustin, H., & Akmaluddin, A. (2023). Penerapan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam era digital: Analisis konflik sosial media berdasarkan perspektif Pancasila. *Civilia*, 2(3), 45–56. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2359/2155>
2. Bail, A., et al. (2018). Exposure to opposing views on social media can increase political polarization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(37), 9216–9221. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115>
3. Chaerudin, R. (2025, September 11). Polarisasi media sosial dan literasi kritis di Indonesia. *Tandaseru*. <https://www.tandaseru.com/2025/09/11/polarisasi-media-sosial-dan-literasi-kritis-di-indonesia/>
4. Cinelli, M., et al. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
5. GoodStats. (2025, May 13). Indonesia Digital Report 2025: Social media use. GoodStats. <https://goodstats.id/publication/indonesia-digital-report-2025-social-media-use-9yFMD>
6. Gorwa, R. (2019). What is platform governance? *Information, Communication & Society*, 22(6), 854–871. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>
7. Guess, M., et al. (2020). A digital media literacy intervention increases discernment between mainstream and false news in the United States and India. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(27), 15536–15545. <https://doi.org/10.1073/pnas.1920498117>
8. Jain, M. S., Marbun, L. I. F., Sembiring, K. N. A., Nurieka, I. A., & Amren, H. (2024). Pengaruh media sosial terhadap demokrasi Pancasila. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 112–120. <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2154/1298>
9. Metzler, J., & Garcia, M. (2024). Social drivers and algorithmic mechanisms on digital media. *Perspectives on Psychological Science*, 19(5), 735–748. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37466493/>
10. Nisa, N. H. (2023). Refleksi kritis terhadap relevansi Pancasila di era disrupsi digital. *Advances of Social Science and Government Journal*, 4(2), 55–68. <https://jurnal.ucey.ac.id/index.php/AoSsAGCJ/article/view/3064>
11. Title Author Purboyo, M. G., Junaidi, J., Amriwan, A., & Jurusan Sosiologi. (2024). Eskalasi partisanship politik dalam pembentukan polarisasi pada masyarakat digital (Studi pada platform media sosial TikTok). <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/1220>
12. Rahayu, F., & Nugraha, A. (2024). Filter bubble dan echo chamber: Pengaruh algoritma media sosial terhadap pola konsumsi informasi mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(1), 45–60.
13. Ramlan, A., et al. (2025). Penjiwaan nilai hari lahir Pancasila 2025: Memperkokoh ideologi Pancasila dalam pembangunan demokrasi pasca Pemilu dan Pilkada 2024. *KPU Kabupaten Sekadau*. <https://kab-sekadau.kpu.go.id/blog/read/penjiwaan-nilai-hari-lahir-pancasila-2025>
14. Sihura, G. L., Tricia, E., Novianti, H., Angraeni, T., Fransisca, & Dariyo, A. (2024). Pemahaman gen Z terhadap demokrasi Pancasila di era digital. *Artikel Ilmiah Humaniora*, Universitas Tarumanagara Jakarta.
15. Wulandari, V. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 17(2), 101–115. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/BIP/article/view/423>